FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT KELURAHAN ULAK KARANG UTARA TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA PADANG TAHUN 2010

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh

RICHE ELVANORA

04193002

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2011

ABSTRAK

RICHE ELVANORA, 04193002, Skripsi dengan judul Faktor Penyebab Masyarakat Ulak Karang Utara Tidak Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Padang Tahun 2010. Pembimbing 1 Drs. Wahyu Pramono, M.si dan Pembimbing 11 Andri Rusta, S.IP, M.PP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Padang. Skripsi ini terdiri dari 80 halaman dengan 17 referensi buku, 4 skripsi, 2 artikel internet, dan 4 Undang-Undang.

Penelitian ini melihat faktor penyebab masyarakat Ulak Karang Utara tidak memilih pada pemilihan kepala daerah langsung Kota Padang tahun 2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah alasan mengapa orang tidak memilih pada pemilihan kepala daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara langsung dengan responden. Sedangkan analisa data menggunakan program SPSS 15.00 dengan analisis data menggunakan analisis frekuensi.
Dari penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan data bahwa perilaku memilih memiliki hubungan yang erat dengan alasan orang tidak memilih pada pemilihan kepala daerah, ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk tidak memilih, yaitu: faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan latar belakang status sosial ekonomi.

Kata kunci: *Masyarakat Kelurahan Ulak Karang Utara, Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Memilih, Pemilihan Kepala Daerah.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan tahapan awal konsolidasi demokrasi di Negara-negara yang menganut sistem tersebut[1]. Mekanisme ini dianggap sebagai wujud kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada rakyat agar dapat ikut menentukan siapa yang mewakili mereka di dalam pemerintah. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menyatakan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa : Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota[2].

Proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini merupakan sebuah jaminan keberlangsungan dalam proses demokrasi. Selain optimisme terhadap perbaikan kualitas kepemimpinan disebuah daerah, momentum Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga merupakan proses pembelajaran politik bagi masyarakat.

Konteks pembelajaran politik di sini meliputi beberapa hal : *pertama*, Pemilih Kepala Daerah secara langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa menyalurkan kepentingan–kepentingan, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cermin dari kebutuhan yang ingin diwujudkan.

---

[1] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm : 17

[2] Pasal 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan cara demikian, maka kedaulatan rakyat akan dapat terwujud. *Kedua*, rakyat memilih kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari hal tersebut mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggung jawabkan. *Ketiga*, rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya, mereka harus mempersiapkan mental untuk menerima perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri, meskipun secara tidak langsung kedewasaan politik ini sudah dibuktikan dalam pemilihan Presiden yang berlangsung secara aman, tertib dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah yang diharapkan adalah Pemilihan kepala daerah yang menegakkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, egalitarian, supermasi hukum, dan reprentasi yang maksimal dan optimal dalam penyelenggaraan. Pemilihan Kepala Daerah Demokratis membutuhkan keterlibatan masyarakat yang bukan hanya sekedar memilih saja, namun juga akses masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam menentukan calon kepala daerah yang bakal dijadikan sebagai pemimpin mereka. Mekanisme konvensional yang bisa di lakukan adalah dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai kader dan simpatisan partai politik yang terlibat dalam konvensional penjaringan calon kepala daerah yang berasal dari kader politik.

Selain itu bisa dilakukan juga misalnya bagi masyarakat yang non-partisipan untuk melakukan penjaringan calon kepala daerah dengan membentuk kaukus politik untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan menghasilkan calon kepala daerah yang akan didukung untuk bertarung di arena terbuka dalam Pemilhan Kepala Daerah Langsung. Segala hal bisa dilakukan ketika kesadaran politik masyarakat cukup baik.

Pemilihan Kepala Daerah demokratis juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan mekanisme pengawasan dengan pengontrolan pelaksanaan dan penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah. Misalnya dengan diberlakukannya kebebasan dan kewenangan bagi Komite Independen masyarakat pengawas dan pengontrol Pemilihan Kepala Daerah. Komite ini akan bekerja untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan Kinerja Komisi Pemilihan Umum, kinerja partai-partai politik peserta Pemilihan Kepala Daerah, kinerja calon kepala daerah, kinerja kelompok pengusung calon kepala daerah lainnya dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir politik uang, politik kekerasan, pelanggaran hukum, dan lain-lain yang akan mengotori jalannya Pemilihan Kepala Daerah Demokratis yang baik dan benar.

BAB V11

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan Bab terdahulu, baik dalam kerangka teoritis, pendeskripsian dan pengujian statistik maka penelitian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

7.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap factor penyebab masyarakat Ulak Karang Utara tidak memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Padang Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Padang masih banyak masyarakat yang tidak memilih pada saat pemilihan, khususnya masyarakat di Kelurahan Ulak Karang Utara. Keadaan ini disebabkan karena faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan latar belakang status sosial ekonomi.

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa tinggi rendahnya perilaku seseorang untuk memilih atau tidak memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis diukur melalui: adanya kehadiran orang lain (kurang menyukai sikap panitia) suasana TPS, adanya ancam dari partai atau seseorang. Selain itu faktor sistem politik diukur melalui: komposisi responden berdasarkan ikut memilih atau tidak memilih, pemahaman manfaat pemberian suara, minat dalam memperoleh informasi hasil perolehan suara Pilkada dan pengetahuan tentang sumber hukum.

Sedangkan faktor kepercayaan politik diukur melalui: pengetahuan visi misi pasangan calon pada Pilkada, menghadiri kampanye pada Pilkada, pengetahuan kinerja partai yang dipilih pada Pilkada, partai politik yang diusung dan keikutsertaan berpartisipasi dalam partai yang dipilih. Faktor terakhir dilihat dari latar belakang status sosial ekonomi yang diukur melalui:

keadaan ruang (wilayah) responden pada hari pemungutan suara, keadaan ekonomi keluarga, dan pengaruh keluarga.

Setelah melakukan survei dan pengujian statistik, ditemukan bahwa, ternyata Faktor Penyebab Masyarakat Ulak Karang Utara Tidak Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Padang memang mempengaruhi ketidak hadiran politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Padang.

7.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perilaku memilih masyarakat Ulak Karang Utara dan faktor-faktor yang berhubungan dengan alasan orang tidak memilih, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab masyarakat tidak memilih pada Pemilihan Kepala Daerah.
2. Masyarakat Kelurahan Ulak Karang Utara seharusnya lebih meningkatkan kesadarannya dalam proses pemilihan, terutama dalam hal pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung.
3. Pemerintah perlu memberikan pendidikan politik secara maksimal kepada masyarakat Ulak Karang Utara khususnya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia umumnya, agar mereka dapat menumbuhkan rasa kesadaran terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi atau Teori

B. N Marbun. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiyanto. 2000. *Tata Negara*. Jakarta; Erlangga.

Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta Rineka Cipta

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*: Lipi Press

Michael Rush dan Phillip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. Hal 197

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia

Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Era Reformasi. Jakarta: Medpress

Buku Metodologi

Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Faisal, Sarapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Hasan, Iqbal . 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara

Nugroho, Bhuono Agung, 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik P[illegible]n Dengan SPSS*. Yogyakarta.

Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005 . *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta : PT Raja Grafindo

R, Sumarsono. 2007. *Bahan Bacaan Metodologi Penelitian*

Soehartono, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia

Sugiarto. 2003. *Teknik sampling*. Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2005. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed). 2005. *Metode Penelitian Sosial*: Berbagaigai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana

Skripsi

Haswinda, Istia . 2008. *Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dan Situasi Hari Pemungutan Suara Dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Ulak Karang Utara dalam Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 20*05. Fisip Unand, Padang

Permana, Fredo. 2007 *Perilaku Memilih Mahasiswa Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2005*. Fisip Unand. Padang

Violina, Sylvia. 2011. *Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilihan Preside di Kota Padang. Fisip Unand, Padang*

Wardana, Andy Fahleni. 2006. *Hubungan Antara Tingkat Kesadaran Politik dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Fisip Unand, Padang

Situs Internet

http://www.Padang.90.id/V2/content/view/5/6 diakses tanggal 23 desember 2010

M abduh, Ed *Demokrasi dan Pentingnya Partisipasi Pemilih* Kamis, 05 Maret 2010

Undang-Undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999

Undang-Undang No 23 Tentang Pemerintahan Daerah